

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam hubungan internasional, kesetaraan gender dipahami sebagai hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Gender dalam terminologi ini mengacu pada atribut sosial dan peluang yang terkait dengan menjadi perempuan dan laki-laki. PBB mendefinisikan kesetaraan gender dengan cara yang sama seperti visibilitas, pemberdayaan, dan partisipasi yang setara dari kedua jenis kelamin di semua bidang kehidupan publik dan pribadi. Gender didefinisikan sebagai peran, perilaku, aktivitas, dan atribut yang dibangun secara sosial yang dianggap pantas oleh masyarakat tertentu bagi perempuan dan laki-laki. Pada saat yang sama, PBB menekankan dalam dokumennya bahwa perempuan dan laki-laki adalah kategori heterogen yang mencakup, antara lain, asal usul, agama, kecacatan, identitas gender, atau orientasi seksual, dan kesetaraan berlaku untuk semua orang terlepas dari ini (Abawe, 2022).

Salah satu aspek yang menjadi isu dalam kesetaraan gender adalah isu pendidikan. Pendidikan adalah hak asasi manusia itu sendiri dan sarana yang sangat diperlukan untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya tanpa memandang jenis kelamin. Pendidikan adalah salah satu pionir yang mengidentifikasi pendidikan sebagai bentuk investasi yang penting bagi pembangunan ekonomi. Selain itu, serangkaian penelitian yang ekstensif telah menemukan bahwa pendidikan memiliki pengembalian pendidikan yang terukur dan tidak terukur, ekonomi dan non-ekonomi kepada masyarakat. Pengaruh positif yang dimainkan oleh pendidikan di bidang-bidang tersebut termasuk penurunan angka kematian bayi, peningkatan harapan hidup yang positif, penurunan tingkat kesuburan, promosi demokrasi, hak asasi manusia, stabilitas politik, dan penurunan kejahatan (Ahmadi, 2022).

Dalam penelitian ini, penulis ingin meneliti soal peraturan Taliban terkait larangan perempuan dalam mendapatkan pendidikan tinggi di Afghanistan dari sudut pandang *Sustainable Development Goals* nomor 4 (*education goals*). Sama seperti di seluruh negara, di kawasan Afghanistan sendiri, pendidikan adalah hak

asasi manusia itu sendiri dan sarana yang sangat diperlukan untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya tanpa memandang jenis kelamin 'menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, serangkaian penelitian yang ekstensif telah menemukan bahwa pendidikan memiliki pengembalian pendidikan yang terukur dan tidak terukur, ekonomi dan non-ekonomi kepada masyarakat. Pengaruh positif yang dimainkan oleh pendidikan di bidang-bidang tersebut termasuk penurunan angka kematian bayi, peningkatan harapan hidup yang positif, penurunan tingkat kesuburan, promosi demokrasi, hak asasi manusia, stabilitas politik, dan penurunan kejahatan. Oleh karena itu, biaya untuk menolak hak perempuan atas pendidikan sebagai akibat dari diskriminasi gender sangatlah signifikan. Ada korelasi antara kesenjangan gender dalam pendidikan dengan pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi daerah. Kesenjangan yang meningkat karena diskriminasi gender ini merugikan ekonomi dengan meningkatkan inefisiensi dalam penyebaran modal manusia serta dengan meningkatkan tingkat kesuburan dalam suatu populasi. Diskriminasi gender dalam pendidikan, dengan demikian, menjadi tanggung jawab ekonomi sekaligus pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok (United Nations, 2022).

Terkait dengan identifikasi masalah yang ada, Sebelum Taliban digulingkan pada tahun 2001, mereka menerapkan rezim yang keras dan salah satu kebijakan mereka adalah larangan terhadap pendidikan wanita. Pada saat itu, perempuan di Afghanistan tidak diizinkan untuk mengakses pendidikan formal, dan sekolah-sekolah perempuan ditutup. Namun, setelah invasi oleh pasukan koalisi internasional dan penggulingan Taliban pada tahun 2001, situasi berubah. Pendidikan perempuan menjadi lebih mudah diakses, dan banyak kemajuan telah dicapai dalam hal pemberdayaan perempuan di Afghanistan. Pada saat ini, perempuan di Afghanistan memiliki hak dan akses ke pendidikan seperti halnya dengan laki-laki (Inayatullah, 2022).

Di satu sisi, hal ini tentu saja merupakan pelanggaran kepatuhan yang dimiliki oleh Afghanistan dalam nilai-nilai SDGs yang telah diratifikasi oleh Afghanistan. Sebelum pendudukan dan regulasi yang diberikan oleh Taliban, Pemerintah Republik Islam Afghanistan (GoIRA) telah mengambil tindakan untuk

menegaskan komitmennya untuk mencapai SDGs. Kementerian Ekonomi adalah kementerian lini utama dan titik fokus untuk koordinasi, pemantauan, dan pelaporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Afghanistan (A-SDGs). Proses nasionalisasi dikoordinasikan secara erat dengan Dewan Tinggi Menteri untuk memastikan penerapan A-SDGs, dan kerja sama yang lebih kuat dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi masyarakat. GoIRA sedang dalam proses menyelesaikan nasionalisasi A-SDGs, target dan indikatornya. UNDP mewakili sistem PBB di Komite Eksekutif SDGs (Ahmadi, 2022).

Afghanistan telah menjadi pusat perhatian dalam pembuatan kebijakan global. Kekuatan global telah mengeluarkan banyak uang dan darah untuk mengubah masyarakat Afghanistan. Negara ini telah menjadi titik fokus dalam hal pembuatan kebijakan untuk semua kekuatan besar di seluruh dunia. Penekanannya adalah untuk mempromosikan pendidikan untuk memicu perubahan masyarakat yang secara bertahap dapat mengubah masyarakat suku ini. Banyak upaya telah dilakukan untuk mendidik wanita Afghanistan. Akibatnya, melek huruf perempuan telah melihat peningkatan yang signifikan sebelum negara itu jatuh kembali ke kendali Taliban. Saat Taliban mengkonsolidasikan kekuasaan dan membatasi kesempatan bagi perempuan dalam pendidikan, masalah ini menjadi sangat signifikan. Pendidikan perempuan tidak lagi menjadi masalah keaksaraan perempuan meskipun membawa implikasi yang sangat besar bagi perdamaian global dan geo-strategi (Ameyaw-Brobbe, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peraturan larangan Taliban terkait peraturan larangan Taliban terkait pendidikan perempuan di perguruan tinggi di Afghanistan dari sudut pandang *Sustainable Development Goals* nomor 4 (*education goals*). Selain itu, dengan membatasi pandangan dan aspirasi perempuan Afghanistan pada serangkaian pengembangan kemampuan tertentu, sebagai hasil dari akses ke pendidikan, penelitian ini bermaksud untuk memberikan peta garis besar yang menggambarkan potensi kerugian yang mungkin dialami negara akibat diskriminasi gender dalam pendidikan (Bogaert, 2022). Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul

“PENDIDIKAN TINGGI BAGI PEREMPUAN DI AFGHANISTAN : DIBAWAH REZIM TALIBAN.”

1.2 Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah di paparkan oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut **“Bagaimana Pendidikan Tinggi bagi perempuan di Afganistan di bawah Rezim Taliban?”**

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang digunakan dalam riset ini adalah batasan tempat dan waktu. Untuk batasan tempat yang digunakan dalam riset ini adalah di kawasan Afghanistan keseluruhan yang saat ini dikuasai oleh rezim pemerintahan Taliban. Selain itu, batasan tempat lainnya ditentukan hanya di kawasan pendidikan yang ada di tingkat perguruan tinggi saja. Untuk batasan waktu yang digunakan ialah dalam periode tahun 2021 hingga 2022, dikarenakan pendudukan Taliban atas pemerintahan Afghanistan dimulai pada tahun 2021.

1.4 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Sebagai upaya untuk menjelaskan arah dan tujuan umum dari pembahasan penelitian, maka penulis harus memiliki tujuan yang jelas dari identifikasi masalah yang sudah dipaparkan. Tujuan penelitian yang timbul ialah:

1. Untuk menggambarkan tentang aturan SDGS 4 yang menjamin pendidikan berkualitas yang inklusif dan adil serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua
2. Untuk mengetahui regulasi tentang pendidikan bagi perempuan di Afghanistan
3. Untuk mengetahui bagaimana akses pendidikan perempuan di Afghanistan pasca regulasi Taliban

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terhadap dunia pendidikan dan kalangan akademisi terkait dengan tema yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memotivasi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan terutama di bidang hubungan internasional yang ada, tentunya dengan dengan mengeliminasi batasan-batasan yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai topik yang diteliti dan sebagai implementasi ilmu yang diperoleh oleh peneliti dibangku pendidikan serta dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori yang didapat dari bangku kuliah dengan praktik yang terjadi di lapangan.